

## **DARI MONOPOLI HINGGA PELABUHAN BEBAS: AKTIVITAS PERDAGANGAN DI KARESIDENAN TERNATE 1854-1930**

Rustam Hasim

Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Khairun Ternate.

E-mail: rustamhasyim@gmail.com

### **ABSTRACT**

This paper discusses trading practices conducted in the Ternate Residency after the Dutch turned the port in the residence as a free port in 1854. In line with this policy, several major export and import materials supported the growth of the port meanwhile clove commodities did not become superior goods due to Hongotochten and extirpate policies in the VOC period. This fact shows that the policy of turning into the free port in 1854 was not only apart of the intention to control the economic resources within Ternate Area, but also to create Ternate as a colonial area under the Dutch's control. This, in fact, opened a new chapter for trading activities in the region. The purpose of this policy is to attract and concentrate the commercial activities of the indigenous population to the free port under supervision of the Dutch colonial for they hoped to prevent an indigenous merchant from establishing trade relations with other European nations. This study found that in 1854 the Dutch government made Ternate a free port is the implementation of a free port as the first step to protect economic interests, besides it is intended to place the Dutch in maintaining trade control in the territory of the colony.

*Key words: Trade chains, export import commodity, Free Port, and Ternate Island*

### **PENGANTAR**

Catatan sejarah Ternate semakin populer terutama karena sebagai produsen rempah-rempah. Tanah yang subur dan ekologi yang mendukung pertumbuhan, menjadikan Ternate penghasil cengkeh dan pala terpenting di Kepulauan Maluku. Keadaan itu juga didukung oleh posisi geografisnya yang terletak dalam kesatuan lintasan Laut Maluku, Sulawesi, dan Laut Sulu, sehingga menempatkan kawasan ini sebagai bagian dari jalur utama internasional. Menurut Leonard Y. Andaya, keterlibatan Ternate dalam perdagangan sudah lama bahkan sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Informasi awal mengenai perdagangan cengkeh disebut dalam ekspedisi Ibnu Batutah, Tome Pires dan Antonio Galvao menyebut Maluku (Ternate, Tidore, Moti, Makian) sebagai penghasil cengkeh yang

dibutuhkan dalam perdagangan. Perdagangan rempah-rempah, khususnya di Ternate menjadi penggerak aktivitas perniagaan di kawasan Asia Tenggara dan memunculkan interaksi dengan beberapa bangsa dan budaya di Nusantara (Andaya, 1993).

Sejarah perdagangan di Ternate tidak dapat ditempatkan secara terpisah dari sejarah perdagangan di wilayah kepulauan Indonesia pada khususnya, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, dan Eropa pada umumnya. Tidak dapat disangkal lagi Ternate merupakan destinasi penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan antarbangsa pada abad ke XIV. Jalur pelayaran dan perdagangan ini membentang dari Indonesia bagian barat melalui selat Malaka terus ke pesisir utara Jawa Timur terus ke Banda dan Maluku (Ternate). Menurut R. Z. Leirissa, faktor utama daya tarik Maluku (Ternate) bagi para pedagang antar bangsa ialah rempah-rempah, sehingga Maluku oleh orang Eropa diberi julukan *The Spice Islands* (kepulauan rempah-rempah). (Leirissa, 1999).

Perdagangan di Ternate mengalami kemajuan berarti ketika Pemerintah Kolonial Belanda menjadikan Ternate sebagai pelabuhan bebas pada 1854. Kebijakan ini bertujuan agar memikat dan memusatkan kegiatan perniagaan penduduk pribumi ke pelabuhan bebas yang berada di bawah pengawasan, sehingga berharap dapat mencegah mereka untuk menjalin hubungan niaga dengan bangsa Eropa lainnya. Penerapan kebijakan pelabuhan bebas merupakan langkah awal bagi perlindungan kepentingan ekonomi. Selain itu juga dimaksudkan untuk memperkuat posisi Belanda tetap menguasai perdagangan di koloninya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pelabuhan bebas ini adalah bebas bersyarat, artinya bebas dilayari oleh kapal-kapal asing maupun pribumi tetapi dengan syarat membayar pajak. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Leirissa, bahwa setiap kapal yang berlabuh harus dikenai pajak, dan ketika berlayar harus mendapatkan surat izin pelayaran yang memuat tentang nama kapal, pemilik, jenis muatan, nama nakhoda, dan daerah tujuan pelayaran (R.Z. Leirissa, 1996). Hal senada juga dikemukakan Edward L. Poelinggomang bahwa sejak Pemerintah Hindia Belanda menjadikan tujuh pelabuhan sebagai pelabuhan bebas di kawasan Timur Indonesia yakni; seperti Makassar (1847), Manado, Kema (1848) Kaili, Banda, Ambon (1853), dan Ternate 1854, maka dikenakan peraturan yang seragam di pelabuhan-pelabuhan tersebut yakni tarif pajak ekspor-impor pelabuhan dan pengaturan komoditas perdagangan (Poelinggomang, 1991).

Dengan adanya pelabuhan bebas ini, maka *terjadi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi*. Pertumbuhan ekonomi di Keresidenan Ternate mengalami kemajuan yang pesat. Ketika memasuki tahun 1870 yang ditandai dengan diterapkannya liberalisasi ekonomi dan peningkatan perkapalan, maka mendorong munculnya bahan-bahan baru untuk ekspor. Ada dua ciri khas dalam pertumbuhan itu, pertama, perekonomian kolonial Belanda yang mengutamakan sektor pertambangan hasil bumi dan laut. Kedua, munculnya diversifikasi komoditas ekspor perkebunan yang

disertai dengan meningkatnya hasil perkebunan rakyat. Bagi Keresidenan Ternate, dalam periode itu pemerintah Hindia Belanda dan para investor swasta membuka lahan perkebunan yang berorientasi ekspor seperti; di *Afdeeling* Bacan dengan komoditas cengkeh dan damar (BAM), di *Afdeeling* Tobelo perkebunan kelapa (MKCM) dibuka, dan di Ternate Selatan dengan perkebunan pala (*Boddendijk*). Dalam periode yang sama, sebanyak 15 hak guna usaha telah diberikan penguasa lokal Kesultanan Ternate atas nama pemerintah. Dalam periode tersebut, daerah ini tidak lagi bergantung pada rempah-rempah (cengkeh dan pala) karena munculnya berbagai komoditas baru, seperti kopra, damar, karet, tembakau, kopi, coklat dan sarang burung, serta hasil laut mulai menjadi andalan. (Adnan Amal, 2001).

Munculnya bahan perdagangan baru tersebut selain di dorong oleh kebutuhan pasar internasional dan investasi swasta di sektor perkebunan dan perikanan. Perkembangan ini karena didukung oleh adanya infrastruktur perdagangan seperti pelabuhan, gudang, jalan, dan dibukanya hubungan laut dengan beroprasinya pelayaran niaga kapal uap antar pulau di hampir seluruh Nusantara oleh KPM. Sebagaimana di kemukakan oleh J. Thomas Lindblad bahwa pertumbuhan ekonomi di luar Jawa mengalami kemajuan yang ditandai oleh indeks ekspor yang meningkat. Kondisi ini membuktikan adanya berbagai pola ekonomi dan kinerja ekspor yang berhasil diluar Jawa (J. Thomas Lindblad. 1998).

Hal itu mendorong tampil dan berperannya kelompok-kelompok pedagang tersebut di kawasan ini. Sebagaimana dikemukakan oleh H.W. Dick yang menyebutkan 5 suku bangsa bangsa yang memiliki peranan penting melakukan perdagangan antar pulau di Indonesia bagian timur yakni: Bugis, Makassar, Madar, Buton dan Madura (Dick, 1998). Pada umumnya mereka adalah pedagang perantara. Pedagang ini memiliki dua fungsi yaitu pedagang distribusi yang menjual dan menyebarkan barang-barang konsumsi masyarakat dan pedagang koleksi yang bertugas mengumpulkan hasil-hasil produksi pertanian kemudian dijual kepada konsumen. Sementara itu, penduduk pribumi juga tertarik menjadi pedagang karena didorong untuk memasarkan hasil- hasilnya. Dengan kehadiran banyak pedagang di Ternate, maka memunculkan jaringan atau zona-zona perdagangan yang memperlihatkan peranan kelompok-kelompok itu di dalamnya.

Untuk memperjelas topik tentang perdagangan di Karasidenan Ternate sejak Pelabuhan Ternate menjadi pelabuhan bebas (1854-1930), maka beberapa pertanyaan diajukan, yakni bagaimana perkembangan dan jaringan perdagangan di Keresidenan Ternate sejak tahun 1854-1930? Bagaimana pola perdagangan dan jaringan pemasaran komoditas di Keresidenan Ternate 1854-1930? Bagaimana dampak aktivitas perdagangan komoditas ekspor-impor bagi perekonomian Ternate?

## *Pola Perdagangan di Keresidenan Ternate*

Bagian ini dikemukakan dua pola (bentuk) perdagangan yang terjadi di Keresidenan Ternate sejak dijadikan sebagai pelabuhan bebas 1854, yakni perdagangan keluar dan perdagangan ke dalam. Perdagangan keluar mencakup semua perdagangan yang berhubungan dengan lingkungan diluar di wilayah Keresidenan Ternate, kepulauan Indonesia Timur maupun jaringan perdagangan internasional. Namun demikian, tidak semua hubungan perdagangan Ternate dengan dunia luar dibahas disini. Hanya beberapa yang disinggung dalam tulisan ini disebabkan oleh tersedianya sumber sejarah seperti hubungannya dengan Halmahera, Ambon, dan Makassar. Ketiganya berpengaruh bagi perkembangan jaringan perdagangan di Ternate. Penekanan pembahasan ini dilihat pada hubungan yang memiliki corak yang berbeda, misalnya hubungan Ternate-Halmahera di tekankan pada sejauhmana wilayah itu dapat menyuplai komoditas-komoditas ekspor, selain itu hubungan ini juga melihat bagaimana kewajiban penduduk Halmahera (Jailolo, Sahu, Loloda, Kao, Galela dan Tobelo) mengirim upeti dan pajak kepada penguasa di Keraton Ternate. Hubungan Ternate-Ambon lebih menekankan pada pemenuhan komoditi cengkeh di saat Ternate tidak lagi memproduksinya akibat dampak jangka panjang dari kebijakan *extirpasi* dan *hongitochten*. Sedangkan hubungan Ternate-Makassar merupakan jaringan pemasaran produksi impor Makassar dalam hubungan niaga dengan bandar niaga asing serta pembelian produksi dari wilayah ini untuk dipasarkan keluar.

Sementara dalam katagori perdagangan kedalam adalah melibatkan jaringan perdagangan antar satu pulau dengan pulau yang lainya di wilayah Karesidenan Ternate seperti hubungan dagang antar pantai dengan pedalaman. Dalam konteks ini hanya dibahas di beberapa wilayah seperti Halmahera, Bacan, Sula, dan Banggai. Hubungan ini terus berlanjut hingga sisi barat Laut Banda ([Rabani, 2019](#)). Para pedagang dalam kelompok ini terdiri dari penduduk setempat atau agen-agen yang berhubungan dengan penduduk di tempat-tempat penjualan (perantara). Pada akhir bab dikemukakan peranan pedagang perantara (Cina dan Makassar) dan bagaimana komunitas ini dapat membangun jaringan dengan kelompok pedagang Eropa (eksportir) dan pribumi (pengumpul).

### *1. Ternate- Halmahera*

Sejak pelabuhan Ternate dijadikan sebagai pelabuhan bebas, secara langsung telah mempengaruhi aktivitas perdagangan di Karesidenan Ternate. Dalam hal ini terdapat kutub-kutub sedang berkembang dan saling mengisi satu sama lain, Halmahera muncul sebagai penghasil beras, komoditas hasil pertanian dan

perikanan. Sementara Ternate mengimpor komoditas yang dibutuhkan di daerah ini, Dalam konteks ini hubungan Ternate – Halmahera dibagi dalam dua katagori. Pertama, lebih menekankan kewajiban penduduk Halmahera mengirim upeti dan pajak kepada penguasa di Keraton Ternate. Kedua, merupakan jaringan pemasaran produksi Ternate dan hubungan niaga dengan bandar niaga asing serta pembelian produksi dari wilayah ini untuk dipasarkan keluar.

Untuk yang pertama adalah sudah menjadi sebuah kewajiban penduduk di *Afdeling* Halmahera (Jailolo, Sahu, Loloda, Kau, Tobelo, dan Galela) untuk menyerahkan upeti setiap tahunnya kepada Istana Ternate. Kewajiban ini dibagi dua, yakni; pertama adalah kewajiban mengirim upeti dalam bentuk natura kepada penguasa di karaton. Kedua, adalah kewajiban untuk menyediakan sumberdaya manusia untuk kepentingan karaton (*heerrendiensten*). Pengarahan sumberdaya manusia tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu; (1) sumberdaya manusia untuk kepentingan rumah tangga, (2) sumber daya manusia untuk *extirpatie* atau penghancuran kebun-kebun cengkeh, dan (3) untuk *hongitochten* (Lerissa, 1992).

Bentuk hubungan ini adalah ditempatkan salah satu wakil sultan (*sangaji*) di tiap-tiap distrik di Halmahera Utara yang bertugas memelihara hubungan antara distriknya dengan keraton. Sekaligus mengatur berbagai bentuk kewajiban (upeti) yang harus dipenuhi penduduk kepada sultan. Sebagai pejabat pemerintah para *sangaji* diangkat dan diberhentikan oleh sultan dan berkewajiban mengawasi kepentingan sultan di wilayah kekuasaannya. Khusus di Halmahera Barat dan Utara, para *sangaji* mempunyai fungsi politik ganda. Selain sebagai penguasa yang disahkan oleh sultan, mereka juga berkewajiban memelihara hubungan antara distrik dengan *kadaton*. Hubungan ini paling nyata terwujud dalam suatu sistem *nagse* (menyetor upeti). *Sangaji* mengatur berbagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi penduduk kepada sultan (Hasmawati & Hasyim, 2017).

Kewajiban bentuk natura yang setiap tahun dikirim ke Ternate seperti damar, rotan, kayu cendana, kayu besi, kayu jati, sagu, kelapa, jagung, beras dan burung cendrawasih. Dilaporkan setiap tahun *Afdeeling* Jailolo, Sahu, Gamkonora, Loloda, Kao dan Galela, harus mengirim 20 orang dan empat kora-kora bagi pelayanan umum, 275 pon beras putih sosoh (tumbuk) dan 42 pon beras yang belum sosoh (tumbuk) bagi setiap penduduk laki-laki. Untuk wanita yang belum menikah, 5 pon beras tumbuk dalam bakul yang indah. *Afdeeling* Kao harus memberikan 12 orang dan 4 kora-kora untuk pelayanan umum, 1 botol atau ½ mutiara. 50 orang dipekerjakan di kapal yang berlayar secara teratur antara Ternate dan Sulawesi (Hanna Willard A. & Des Alwi, 1996).

Sementara di *Afdeelingn* Sula (Xula) harus mengirim 15 koyan (1 koyan= 2 pikul) beras tumbuk, 180 *koele* minyak kelapa, 1 pikul lilin, 160 pak sagu, 12 batu giling, 30 cengkang penyu, 1 keranjang anyaman, 1 ikat kepala, 26 potong balok kayu, 26 ikat

kayu bakar dan 2-10 orang untuk awak perahu dan militer. Selain itu sultan juga mendapat masukan dalam bentuk pajak seperti *ngase damar* sejumlah f. 7,50 perkapala dan setiap tahun harus menyerahkan; *ngase kebon*, *ngase kayu*, *ngase perahu*, *ngase baruboo*, *ngase dendeng rusah*, dan *ngase kalero*. Selain bentuk natura juga menyediakan sumberdaya manusia. Menurut catatan residen C.F. Goldman, sekitar 30 orang dari jumlah tersebut oleh sultan diserahkan kepada para pejabat Belanda untuk dipekerjakan di kebun-kebun mereka dengan upah masing-masing f 6-10 setiap bulan. Selain itu ada pula yang diserahkan untuk dipekerjakan sebagai kuli di pelabuhan dengan upah 20 sen/hari (C.F. Goldman, 1864).

Di samping itu mereka berkewajiban menyerahkan upeti setiap tahun, para sangaji dari distrik-distrik Jailolo dan Sahu juga berkewajiban menyediakan beras dan sagu setiap tahunnya dalam jumlah tertentu bagi kebutuhan *kedaton* Ternate dan para pegawai Belanda. Daerah ini layak disebut sebagai lumbung pangannya Ternate oleh karena sebagian besar kebutuhan bahan makanan pokok seperti beras dihasilkan dari daerah ini. Hasil produksi beras ini di samping untuk mencukupi kebutuhan penduduk sendiri, juga diserahkan kepada sultan untuk kebutuhan makan sehari-hari anggota keluarga kerajaan. Sultan juga mempekerjakan sebanyak 100 orang penduduk dari pulau ini untuk melakukan berbagai pekerjaan rutin sehari-hari di lingkungan istana kerajaan. Selain Sultan, para sangaji di daerah ini juga memperoleh penghasilan berupa berbagai hasil pertanian sebagai kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, sagoe, kelapa, jagung dan sebagainya. Di samping itu juga memperoleh penghasilan berupa berbagai komoditas perdagangan berharga lainnya yang dihasilkan dari daerah ini yaitu kerang mutiara, sarang burung, penyu dan tripang. Seperti diketahui berbagai barang berharga ini banyak diperdagangkan secara gelap oleh orang-orang Tidore dan para pedagang kecil yang berasal dari Ternate (orang-orang China dan penduduk timur asing lainnya).

Kewajiban menyediakan beras oleh distrik Sahoe malah tidak terbatas atau berlaku setiap saat sampai kini. Selain bentuk upeti/pajak yang didapatkan di atas, terdapat pula komoditi lain seperti penyu dimonopoli sultan. Produk laut termasuk "barang terlarang" dan tidak diperkenankan diperdagangkan oleh penduduk kepada pedagang. Distrik Sahoe, merupakan daerah-daerah penghasil beras dalam jumlah yang besar. Dari distrik Sahoe saja setiap tahunnya penduduk mampu mengekspor padi ke daerah lain sebanyak 60 *koyang*. Selain itu daerah ini terdapat banyak hutan pohon Sagu yang melimpah dan di wilayah perairannya di sepanjang pesisir sampai ke distrik Loloda terdapat banyak kerang-kerang mutiara. Untuk mengambilnya orang harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Sultan. Akan tetapi di sini banyak penduduk yang berani untuk melanggar larangan tersebut dan mengambil kerang mutiara dari perairan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Sultan (J. Baretta, 1921).

Sementara dalam konteks yang kedua mengenai hubungan pemasaran dan produksi di Halmahera lebih dinamis dalam aktivitas perdagangan. Munculnya pusat-pusat baru yang memberikan arti pada pertumbuhan ekonominya. Halmahera muncul sebagai daerah penghasil beras di Keresidenan Ternate. Selain itu, daerah ini juga menghasilkan komoditi seperti, kopra, coklat, dan kerang mutiara. Hasil-hasil daerah ini diperdagangkan melalui pelabuhan yang lebih bebas dari pengawasan pemerintah Belanda. Di Halmahera Barat hampir semua aktivitas perdagangan terkonsentrasi di *Afdeeling* Jailolo dan Sahoe, karena daerah ini adalah penghasil beras dan sagu, maka terdapat sejumlah pendatang Bugis-Makassar dan sejumlah orang Eropa dan Cina. Adanya pedagang Cina yang berpengaruh di daerah itu membawa tempat itu muncul sebagai pelabuhan yang ramai di penghujung abad ke-19. Tetapi pelabuhan Jailolo ini tampak lebih terkait jaringan dibawah kontrol pemerintah. Selain Cina adalah Bugis-Makassar yang datang berdagang dan membawa barang-barang buatan Eropa seperti kain, barang dari besi, porselin, dan tembikar. Sebaliknya mereka membeli komoditas setempat seperti, tripang, coklat, kopi, kopra, dan sarang burung (Lapian, 1980).

Pada tahun 1895 perahu-perahu Bugis-Makassar, Banda yang datang melakukan perdagangan di Halmahera. Dengan sistem angkutan perahu mereka menghubungkan tempat-tempat di Karesidenan Ternate. Adanya perbedaan hasil-hasil yang dimiliki antara Ternate dan Halmahera telah mendorong majunya lalulintas perdagangan. Selain itu sejumlah pedagang Burger berdomisili di Ternate dan Tidore mempunyai relasi yang luas di Halmahera. Beberapa contoh dari pedagang yang muncul dalam kurun waktu itu seperti Van der Plas, Elias van Room, Phaoanlok dan Si Siong. (*Leirissa*, 1992).

**Tabel 1.** Barang-barang Impor di Halmahera 1864

Komoditi	Asal-usul	Nilai
Barang Industri	Inggris	10.845
Barang Rumah Tangga	Eropa	42.419
Tembikar	Cina	15.650
Batang Besi dan Kawat	Jerman	3.751
Peralatan Besi	Eropa	7.218
Jenefer	Jerman	20.350
Barang Tembaga	Cina	73.900
Kain Katun	Eropa	32.000
Amunisi		4.680
Senapan	Cina	37.690
Keping Perak		24.000
Barang Besi	Eropa	14.799

Mata Uang		48.000
Barang Perak		5.000
Beras	Jawa dan Makassar	70.4500

Sumber: Laporan Umum Residen C.F. Goldman tahun 1864.

Para pedagang tersebut dengan melalui sistem barter, kadang-ladang secara kredit. Mereka menyalurkan berbagai barang kebutuhan yang tidak dihasilkan di tempat-tempat terkecil, seperti alat-alat dari besi maupun bahan-bahan makanan, dan juga tekstil. Bahan-bahan itu dibarter dengan produk seperti, tripang, penyu, dan masoi (sejenis akar setebal jempol yang dianggap mempunyai khasiat menyembuhkan penyakit). Selanjutnya disalurkan lagi melalui para pedagang yang datang ke Ternate. Para pedagang tersebut sebagai perantara dari masyarakat lebih maju dengan dunia pedesaan yang sangat terisolasi.

## 2. Hubungan Ternate – Makassar

Relasi Ternate-Makassar merupakan jaringan perdagangan rempah-rempah yang menghubungkan Karesidenan Ternate dengan Makassar (Sulawesi Selatan) dan pemasaran barang-barang impor yang berasal dari Makassar terutama beras, tekstil, dan mesiu. Keberadaan orang-orang Makassar di Ternate berhubungan dengan aktivitas mereka sebagai pedagang. Umumnya mereka bertempat tinggal di utara Kota Ternate. Nama kampung mereka disebut “kampung Maccassar”, meskipun mayoritas dari penduduk kampung tersebut tidak berasal dari Maccassar, karena bermukim juga penduduk dari etnis lain. Penduduk ini di bawah seorang pemimpin bergelar kapten yang mengacu kepada sebuah gelar kepangkatan sebagai komandan militer (Leirissa, et al., 1999).

Hubungan perdagangan Ternate – Makassar mengalami perubahan pada abad ke XIX. Perubahan itu bukan hanya terjadinya pengawasan wilayah koloni di kepulauan Nusantara kepada pemerintah Belanda. Selain itu, diberlakukan kebijakan pada beberapa pelabuhan bebas di kawasan Timur Indonesia, di antaranya Makassar (1847) dan Ternate (1854). Kebijakan ini mempererat hubungan niaga sekaligus memikat pedagang dan pelaut pribumi untuk meningkatkan aktivitas mereka di pelabuhan dalam pengawasan pemerintah kolonial (Poelinggomang, 1991).

Kebijakan ini menggembirakan pedagang Bugis - Makassar dan Cina. Pada periode ini mereka bebas berlayar untuk membeli dan kemudian menjual berbagai hasil bumi. Aktifitas itu memberi dampak pada Ternate yang berkembang dan tumbuh menjadi pusat pelayaran dan niaga penduduk ke pelabuhan, dari dan ke daerah produksi komoditas dagang.

Dengan berkembangnya Ternate sebagai pelabuhan bebas, maka ikut mendorong para pedagang Makassar-Bugis mengarungi lautan dengan menggunakan armada-armada dagang yang berlayar sampai ke Ternate. Dengan memanfaatkan jaringan perdagangan yang terbentang dari Indonesia bagian Timur melalui Ambon, Tual, Banda terus ke Ternate. Ramainya perdagangan tersebut bukan hanya dilakukan oleh para pedagang Belanda, perantara, dan pribumi, tetapi juga para sultan dan bangsawan kerajaan yang bertugas di daerah-daerah taklukan. Menurut Anthony Reid, hal ini sudah menjadi kebiasaan di kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia pada waktu itu. Sultan/raja berfungsi sebagai kepala pemerintahan/ kerajaan juga sebagai pedagang. (Reid, 2004). Demikian pula sultan di Ternate, selain memangku kekuasaan kenegaraan juga sebagai penguasa di bidang perniagaan.

Dari hasil perniagaan ini diperoleh kekayaan, karena kekayaan merupakan lambang kekuasaan. Sementara para pembantunya (*bobato dunia*) yang bertugas di distrik (*sangaji*) yang berkewajiban mengirim upeti/ pajak dan tenaga manusia kepada kedaton. Maka dari itu dapat dimengerti bahwa sultan dan kaum bangsawan memiliki kekayaan (modal) dan berperan penting dalam penjualan barang-barang dagangan kepada pedagang asing. (A.M. Beretta, 1917).

Kegiatan impor dan ekspor dalam hubungan niaga ini terus meningkat pada periode 1871-1908. Kelompok yang berperan pada jaringan perdagangan ini adalah pedagang Belanda dan *Burgers* serta pedagang dan pelaut Bugis-Makassar. Tabel 2 di menunjukkan hubungan dagang Ternate dan Makassar tahun 1871-1908.

Tabel 2 Hubungan Niaga Ternate - Makassar 1871-1908.

Tahun	Impor			Ekspor		
	Tiba Nilai	Ton	Nilai (f)	Berangkat	Ton	Nilai (f)
1871	65	13672	349757	54	9366	511454
1872	53	14142	321261	56	14200	514285
1873	47	14016	537476	47	13818	665353
1874	42	1496		42	1496	
1875	64	22448		65	23311	
1876	58	19649		58	20250	
1877	41	14389		35	14173	
1878	38	17402		42	20174	

1879	16	508		9	301	
1880	23	336		6	140	
1881	27	1138		12	317	
1882	22	1166		5	789	
1883	18	1231		11	5482	
1884	16	697		10	2015	
1885	14	396		10	2375	
1886	14	1227		3	87	
1887	15	377		4	941	
1888	14	1021		6	179	
1889	16	370		4	141	
1890	10	313		0	0	
1891	8	198		0	0	
1892	12	386		2	51	
1893	20	718		13	346	
1894	32	763		7	180	
1895	16	3063		0	0	
1896	26	473		14	372	
1897	40	30279		43	79050	
1900	50	98182		40	92525	
1901	50	95342		38	96850	
1902	70	90957		42	85016	
1903	61	10935		68	106241	
1904	52	86763		52	86763	
1905	74	144016		74	144016	
1906	85	170014		85	170014	
1907	65	172976		65	172976	
1908	77	175189		77	175189	

Sumber: Edward L. Poelinggomang, *Proteksi dan Perdagangan Bebas: Kajian Tentang Perdagangan Makassar Pada Abad ke-19*, (Amsterdam: Academisch Proefschrift de Vrije Universiteit te Amsterdam, 1991).

Penduduk Makassar – Bugis sejak lama dikenal sebagai pedagang dan pelaut yang melakukan pelayaran niaga ke berbagai wilayah di Ternate. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh H.W. Dick menyebutkan 5 suku bangsa yang memiliki peranan penting melakukan perdagangan antar pulau di Indonesia bagian timur yakni: Bugis, Makassar, Mandar, Buton, dan Madura (Dick, 1975: 69-107).

Dengan berkembangnya jaringan perdagangan ini bukan hanya mendorong munculnya pedagang pribumi, Eropa, dan asing lainnya, akan tetapi lebih dari itu yakni membentuk jaringan pemasaran dan perdagangan baru. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor; (1) munculnya pelaku ekonomi seperti pedagang keliling dan kelontong, (2) munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya membuat pertukaran semakin rumit dan arus lalu lintas angkutan dari satu kota ke kota yang lain dan semakin berkembang, (3) pasar dan desa makin berkembang dalam arti aktivitas ekonomi semakin menggeliat. Sebagaimana dilaporkan dalam laporan umum Residen C.F. Goldman (1858), bahwa para pedagang yang berasal dari Makassar-Bugis, Jawa, Cina, Arab dan Banda aktif berdagang, dan sebagian lainnya sudah menetap. Mereka membawa barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti tembikar, besi, kain, dan bahan makanan yang ditukar (dibarter). Mereka juga membeli beberapa jenis komoditas produk pedalaman dan laut seperti pala, kopra, damar, tripang, mutiara dan sirip ikan hiu, serta cangkang penyu (*Kolonial Verslag*, 1864).

Di pulau Ternate pedagang yang berperan sebagai pedagang perantara (agen) adalah orang-orang *burgers*, Cina, Bugis-Makassar, Jawa, dan Arab. Pedagang perantara ini membeli dan menjual hasil-hasil bumi kepada konsumen. Pedagang ini umumnya berdomisili di kampung Makassar dan Jawa yang letaknya di sekitar *Fort Oranje* dan Keraton Ternate. Pedagang perantara itu biasanya pedagang distribusi, yaitu menyebarkan barang-barang konsumsi yang diimpor dan mengumpulkan hasil produksi pertanian dari rakyat untuk diekspor. Adanya peluang ekonomi baru itu, pada umumnya kurang dimanfaatkan oleh penduduk pribumi. Kebanyakan mereka sebagai pengumpul dan menjual kepada penguasa distrik atau wakil sultan (sangaji).

### 3. Hubungan Ternate- Ambon

Perkembangan perdagangan kedua daerah ini tidak dapat diukur dari nilai ekspor dan impor oleh karena keterbatasan dan ketiadaan data. Meskipun demikian hubungan kedua daerah ini memberi arti dalam perdagangan jika ditelusuri pada abad-abad sebelumnya (era VOC). Menurut R.Z. Leirissa, Ternate dan Ambon merupakan daerah sebagai penghasil komoditi cengkeh di Kepulauan Maluku, bahkan ketika VOC mengadakan *Hongitochten* dengan menebang dan merusak tanaman cengkeh di sebagian Maluku. Ambon dan Banda hanya dibatasi produksi

cengkehnya, tidak ditebang semuanya (R.Z. Leirissa,1999). Sistem itu mengubah posisi Ternate sebagai pengeksport rempah-rempah menjadi daerah penyerahan wajib rempah-rempah. Pada saat yang sama, Sultan Ternate tidak lagi menjadikan rempah-rempah sebagai sumber ekonominya. (Rustam Hasyim, 2017). Maka tidak mengherankan jika daerah Ambon tetap eksis untuk tetap sebagai produsen cengkeh sampai berakhirnya penjajahan Belanda. Dalam hubungan ini sebagai daerah yang sama-sama menghasilkan cengkeh dan pala yang dibutuhkan pasaran internasional, maka para pedagang dari berbagai bangsa turut dalam perniagaan ini. Menurut J.C. Van Leur tidak kurang dari 6000 orang pedagang yang lalu lalang di perairan Maluku (Van Leur, 1995).

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda menjadikan Ambon dan Ternate sebagai pelabuhan bebas pada 1854 membawa dampak pada perdagangan. Di Ambon terjadi perluasan perdagangan, namun tidak bagi Ternate. Di Ternate perdagangan dinyatakan mengalami kemerosotan. Pada periode ini Ternate tidak lagi mengeksport cengkeh sebagai akibat jangka panjang dari *Hongitochten (era VOC) yang melakukan penebangan pohon cengkeh serta kebijakannya yang tidak membolehkan penanaman*. Kondisi Ambon malah sebaliknya, mengalami perkembangannya dan selalu mengeksport komoditi itu, karena cengkeh dari Ambon hanya dibatasi produksinya. Data jumlah pohon cengkeh di Ambon dapat dijadikan bukti bahwa daerah ini masih mengeksport komoditi tersebut.

Jalur perdagangan Ambon - Ternate merupakan jalur utama pelayaran niaga kapal dagang Belanda dari Makassar dan Batavia dengan tujuan utama wilayah produsen untuk mengangkut rempah-rempah. Pengangkutan ini mendorong para pedagang Bugis-Makassar, aktif dalam perdagangan. Tidak banyak sumber sejarah yang dapat disajikan mengenai perdagangan pada jalur ini. Umumnya para pedagang berangkat dari Ternate pada bulan-bulan Pebruari - Maret, dan kembali pada Agustus - September. Khusus untuk Ambon jarang didatangi pedagang Arab, Bugis, dan Cina, tetapi berbeda dengan Ternate justru banyak didatangi para pedagang tersebut (Luhulima, 1977).

Kedatangan pedagang-pedagang ini dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya; Ternate sebagai pusat kerajaan dan rempah-rempah (cengkeh). Penguasa Ternate lebih toleran dan relasi dengan pedagang lebih baik sehingga para pedagang seperti merasa mendapat perlindungan, termasuk bermukim di Ternate. Kondisi ini ikut menjadi pendorong bagi berkembangnya perdagangan. Data laporan-laporan kolonial menyatakan bahwa pedagang-pedagang Bugis-Makassar dan Arab lebih nyaman bermukim di Ternate. Untuk kepentingan perdagangan, para pedagang itu membeli cengkeh dan pala dari Ternate dan Ambon. Data Tabel 3 memuat data penghasil komoditas.

Pelayaran niaga antar pulau itu diawasi dengan cara mengeluarkan surat-surat izin pelayaran (pas) yang menyebutkan jenis bobot dan bobot perahu, pemiliknya, dagangannya dan tujuannya. Juga pedagang-pedagang pribumi (Ternate, Seram, dan Ambon) dan para *burger* yang berprofesi sebagai pedagang diharuskan mendapat izin tersebut. Perdagangan antar pulau oleh para *burger* ini diperoleh dari pihak pemerintah yang melakukan impor dari luar. Selain itu pedagang-pedagang asing yang diijinkan mendatangi bandar Ambon juga berhasil menyediakan mereka dengan berbagai komoditi. Dengan demikian sistem perdagangan tekstil dan barang-barang kebutuhan lainnya yang dipegang oleh pemerintah kolonial, kini diserahkan kepada *burger*. (Leirissa, 1982). Hubungan antara Ternate dan Ambon semakin lancar dengan keluarnya keputusan Gubernur Maluku 1873 tentang penghapusan perdagangan monopoli cengkeh sebagai berikut:

1. Agar seluruh sistem pengolahan dan penjualan cengkeh dibebaskan dari semua campur tangan pemerintah Hindia – Belanda
2. Agar setiap orang dibebaskan menjual cengkehnya kepada siapa saja yang mau membelinya.
3. Sebelum komoditi lain membawa (yang akan diusahakan membawa hasil) pemerintah Hindia-Belanda wajib membeli sisa dari penjualan cengkeh yang tidak terjual secara bebas dengan harga 25 sen setiap *Amsterdamsche pond*.
4. Para regenten setuju mengusahakan komoditi lainnya secara bebas, bila sistem keterkaitan pada negeri dihapuskan.
5. Agar perdagangan cengkeh berjalan dengan baik pelabuhan harus dibuka untuk perdagangan internasional, dan pelabuhan-pelabuhan lainnya dibuka untuk perdagangan lokal.
6. Untuk mengantikan *hassle golden* (uang hasil) yakni prosentasi yang diterima para penguasa desa pada setiap panen cengkeh selama berlakunya sistem monopoli, jumlah yang sama harus dibayar pemerintah Hindia Belanda selama beberapa tahun. (Des Alwi, 1999).

Tabel 3. Daftar Tanaman Cengkeh di Pulau Saparua, Haruku, dan Nusalaut (Ambon) pada tahun 1867.

Nama negeri	Jumlah Kebun	Jumlah Pohon Di Luar Kebun	Total
<b>Pulau Saparua</b>			
Saparua	-	14.936	14.936
Touw	64	8.098	8.162
Paperu	892	7.298	8.185
Buij	32	17.608	17.640
Haria	203	51.784	51.987

Purto	140	25.810	25.950
Mulor	10	-	10
Tuhaha	687	15.527	16.214
Ilhamahu	16	10.453	10.469
Itawaka	3.261	26.782	30.043
Sirisori (Kristen)	1.092	18.278	19.043
Sirisori (Islam)	6.474	14.678	21.152
<b>Total</b>	<b>21.192</b>	<b>322.000</b>	<b>343.192</b>
<b>Pulau Haruku</b>			
Haruku	2.042	16.442	18.485
Sameth	1.075	9.544	10.619
Oma	1.404	16.061	17.465
Abore	2.828	5.573	8.401
Wasu	1.145	9.794	10.939
Hulalio	954	11.101	12.055
Kario	383	3.108	3.491
Pellau	1.485	15.005	16.490
Kailolo	67	7.670	7.737
<b>Total</b>	<b>21.192</b>	<b>322.000</b>	<b>343.192</b>
<b>Pulau Nussalaut</b>			
Sielah	68	5.957	6.254
Leinitu	903	7.885	8.788
Titawai	557	54.582	55.139
Abobu	3.966	29.599	33.565
Akoon	3.162	13.359	16.521
Ameth	4.774	59.453	64.227
Nalahia	1.505	19.607	9.254
<b>Total</b>	<b>14.935</b>	<b>190.442</b>	<b>205.377</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>47.937</b>	<b>624.321</b>	<b>672.258</b>

Sumber: R.Z. Leirissa, *Maluku Tengah di Masa Lampau Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas*, Jakarta: ANRI, 1982.

Dengan dihapusnya monopoli perdagangan cengkeh tersebut, maka peluang komoditas lain masuk ke Ternate menjadi terbuka. Para pedagang asing dan lokal yang meramaikan perdagangan seperti orang-orang **Bugis, Makassar, Arab** datang berdagang dan membawa produk buatan Eropa, seperti makanan, pakaian, dan barang-barang dari besi). Para pedagang itu juga membeli hasil-hasil setempat seperti sarang burung, kerang mutiara, tripang, sirip ikan dan hasil hutan.

Memasuki abad ke-20 Pemerintah Hindia Belanda mengizinkan perusahaan-perusahaan asing (Australia, Inggris, Amerika, Jepang dan Filipina) untuk mencari mutiara, burung cendrawasih. NHM membuka perkebunan kakao dan kopi di Jailolo (Halmahera), dan Seram. Investasi swasta Eropa dan Cina terjadi dengan

pembukaan perkebunan cengkeh di Ambon, Banda, Ternate, dan Tidore. Kapal KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatshappij*) memperluas jaringan pelayaran dan penumpang dari Batavia ke Surabaya hingga ke Kepulauan Maluku. Kapal ini secara berkala mengunjungi Ambon dan Ternate dua kali sebulan. Demikian KPM telah menghubungkan Maluku dengan daerah-daerah di luarnya semakin intensif. Kepulauan Maluku mengekspor cengkeh, kopra, damar dan sagu sampai dekade kedua abad 20 melalui pengangkutan KPM.

Pada periode-periode 1930-1935, hubungan niaga kedua daerah mengalami kemerosotan, karena adanya pembatasan beberapa komoditas ekspor - impor tertentu. Selain itu, posisi Maluku (Ternate, Ambon) sebagai daerah wajib pajak perdagangan, sehingga para pedagang berupaya menghindari kewajiban itu. Akhirnya pedagang pribumi yang sebelumnya memasarkan komoditas mereka ke bandar itu mengalihkannya ke Papua yang pada saat tidak ada pengenaan pajak perdagangan.

## **POLA HUBUNGAN DENGAN PEDALAMAN**

Ternate adalah kota maritim atau negara pantai. Salah satu cirinya adalah mengandalkan "*comersial power*" atau "*sea power*" dan sangat tergantung pada fluktuasi arus perdagangan maritim intrnasional di Asia Tenggara. Sebagai negara pantai, aktivitas (perdagangan) penduduk dimulai dari pantai sebagai tempat menukarkan barang-barang mereka dengan para pedagang. Pada abad ke-19 semakin banyak pedagang dari Makassar-Bugis, Cina, dan Arab datang ke kepulauan ini. maka aktivitas perdagangan pun semakin berkembang.

Pada periode tersebut perdagangan tidak hanya terjadi antar antar pulau tetapi juga ke daerah-daerah taklukan seperti di *Afdeeling* Halmahera, Bacan, Papua yang merupakan daerah pedalaman Ternate. Penduduk pedalaman yang datang ke pantai untuk menjual dan membeli kebutuhan hidupnya. Pedagang luar datang ke pedalaman untuk menjajakan barang-barangnya atau membeli hasil-hasil dari penduduk. P. Van der Crab mengatakan bahwa pada tahun 1855 para pedagang-pedagang Bugis - Makassar tidak hanya menjajakan barang-barangnya di Ternate, Tidore, Bacan, Seram, tetapi juga sudah masuk ke pedalaman Halmahera dan New Guinea (Papua) dengan membawa candu, amunisi, dan senjata dengan harga murah dari Singapura (Crab, 1855).

Dengan realitas itu, maka nampak ada perubahan pola perdagangan antar pantai. Kini bergeser atau nampak pola lain yakni pola antar pantai ke pedalaman.

Hal lain yang dirasakan dari pola baru ini (pantai- pedalaman) yakni perbedaan yang jelas antara sifat kehidupan pantai dan pedalaman, juga hubungan antara pedagang pribumi dan asing. Dalam kaitan ini maka peranan para agen atau perantara menampilkan dirinya sebagai media yang efektif dalam aktivitas ekonomi yang sedang berlangsung. Perbedaan itu yang paling penting adalah pada sisi komoditas perdagangan antara orang-orang pantai dan pedalaman. Orang-orang pantai hidup dari berdagang dan nelayan, sebaliknya orang pedalaman lebih berpegang pada kehidupan bertani yang menghasilkan bahan-bahan makanan berbasis agraris, hasil hutan, dan sejenisnya. Selain itu sistem dalam perdagangan terutama yang berhubungan dengan penduduk pedalaman berlaku sistem perdagangan pertukaran barang yang tidak harus sejenis (barter).

*Di Afdelling, Jailolo, Sahu, Tobaru, Loloda, Tobelo, Galela dan Kau* yang termasuk wilayah Kesultanan Ternate ditempatkan *Sangaji* dengan fungsi sebagai pemungut pajak. Para sangaji itu juga mencari sumber daya manusia untuk kepentingan kadaton (*heerrendiensten*). Selain itu, mereka juga berdagang dengan menjual hasil-hasil hutan kepada para pedagang. Ini terjadi karena faktor jarak dan waktu tempuh antara pusat kerajaan dengan daerah taklukan sangat berjauhan. Pengawasan yang lemah juga menjadi penyebab tambahan atas aktivitas sangaji sebagai pedagang di daerah tugasnya.

Secara ekologi, Halmahera utara sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah di mana pedalamannya berekologi rawa yang banyak ditumbuhi sagu (*matroxylon*). daerah pantainya banyak ditumbuhi hutan bakau (*mangrove*). Halmahera utara juga ditumbuhi tanaman yang mempunyai nilai ekonomi seperti misalnya, kertapang Talisay, Matoa, Bitanggor, Kayu besi, Rotan, dan berbagai jenis buah-buahan. Laut yang mengelilingi Pulau Halmahera juga kaya dengan sumber ekonomi seperti teripang, bia lola, kulit mutiara, agar-agar, dan beragam jenis ikan konsumsi. Sumber daya ekonomi tersebut di perdagangkan dengan para pedagang dari luar Halmahera seperti Buton, Bugis, dan Madura yang biasanya terjadi pada hari minggu sebagai hari pasar. Barang jualanya dibawa dalam keranjang yang disebut *salaoi* yang diberi tali untuk digantungkan pada bahu dan punggung. Bisnis perdagangan lokal ini umumnya dilakukan kaum wanita. Merekalah yang menjadi pelaku aktif dari pergerakan ekonomi di pasar.

## **KOMODITI EKSPOR IMPOR DAN JARINGAN PEMASARAN**

Sebagai wilayah Kepulauan, Maluku membutuhkan transportasi untuk menghubungkan antara satu pulau ke pulau lain. Sampai akhir abad ke-19, transportasi ini dipegang oleh penduduk pribumi untuk berdagang dan mengangkut orang. Pelayaran perahu di Karesidenan Ternate ini pada umumnya dikelola oleh

penduduk setempat yang tinggal dekat pelabuhan. Biasanya para nakoda perahu pantai juga menjadi pedagang. Pada umumnya mereka mengangkut hasil-hasil bumi ke daerah tujuan namun setelah kembali ke daerah asal para nahkoda tersebut membawa barang-barang kebutuhan lainnya seperti beras, gula, dan peralatan rumah tangga. Oleh sebab itu pedagang perantara Cina sejak 1894 banyak menggunakan jasa pelayaran perahu tradisional milik penduduk pribumi yang sebelumnya lebih berorientasi pada pengangkutan kapal-kapal milik KPM. Laporan Residen Ternate C. Bosscher mengakui bahwa peranan penduduk pribumi yang dipercayakan oleh pedagang Cina untuk mencari kopra di wilayah pedalaman. Para pedagang Cina memberikan mereka modal dan biaya pengangkutan hasil-hasil komoditi hasil bumi yang menggunakan perahu layar. Peranan penduduk pribumi dalam proses pengangkutan dari pantai ke pantai mempunyai andil penting dalam perdagangan dan penyediaan komoditas di Ternate. Demikian pula di beberapa *afdeeling* di Karesidenan Ternate. Selain pribumi, para eksportir Eropa juga memanfaatkan jasa pelayaran pantai dalam pengangkutan kopra dari Ternate ke Makassar atau wilayah lainnya dengan perahu layar pribumi (Bosscher 1857).

Dengan potensi sumber daya alam (cengkeh) orang-orang Kepulauan Maluku menukarkan cengkehnya dengan bahan-bahan yang didatangkan oleh para pedagang Cina seperti tembikar, porselin, dan besi. Pertukaran itu dilakukan baik secara kredit maupun barter. Penduduk melakukan perdagangan dari hasil kebunnya dibawa ke pasar untuk dijual. Meskipun mereka tidak dikategorikan sebagai pedagang yang profesional, namun aktivitas pedagang pribumi pada periode itu dengan berkembangnya hasil-hasil penduduk sebagai bahan perdagangan ekspor, memberi jalan bagi semakin munculnya orang lokal, atau petani ikut dalam perdagangan, meskipun bertindak sebagai pedagang kecil namun penting untuk menambah penghasilan mereka. Pengaruh perdagangan pada masyarakat lokal seperti Ternate, Tidore, Makian, dan Halmahera perlu dihadirkan. R.Z. Leirissa mengemukakan bahwa pulau Makian adalah daerah yang paling banyak menghasilkan cengkeh. Selain itu, juga sebagai pusat pelayaran dan perdagangan. Di pelabuhan Makian inilah orang-orang Cina pertama kali membeli cengkeh (abad ke-14) dan mata uang yang digunakan dalam transaksi adalah mata uang Cina (*fang*) (Leirissa, et al. 1993).

Tabel 4. Ekspor Hasil Laut di Karesidenan Ternate 1855-1930 (gulden)

Tahun	Mutiara	Tripang	Sirip penyu
1855	727	1.889	1.218
1857	1.978	1.367	2.829
1860	7.347	7.869	5.171
1862	6.543	6.732	9.065

1869	9.067	19.327	10.223
1870	2.627	8.520	5.235
1871	3.655	9.676	4.024
1877	2.000	=	=
1879	5.000	2.500	7.000
1885	10.000	8.169	3.175
1887	10,000	6.175	=
1892	9.000	<u>11.000</u>	-
1896	5.000	-	=
1901	2000	=	=
1917	5.000	1.727	-
1920	4.000	4.000	3.303
1925	7,799	5.338	5.451
1927	2.183	=	-
1930	447	1.493	1.557

Sumber: diolah dari *Kolonial Verslag* 1855-1930.

Sementara di sektor impor bila dilihat secara **kumulatif** menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Impor Ternate pada tahun 1854 adalah f. 140.852 meningkat mencapai f 153.338 pada tahun 1880 atau naik f 12.486 untuk 26 tahun atau berada di f 480,23/tahun. Kondisi perdagangan di Ternate dalam periode ini, impornya masih jauh dari nilai ekspor yang berarti harapan adanya surplus perdagangan itu tidak terpenuhi. Hal ini terjadi karena investasi perkebunan dan perikanan oleh perusahaan *Bacan Maatschapij* (1882) belum memberikan kontribusi yang besar dalam sektor ekspor dan perdagangan. Larangan terlibatnya sultan dan keluarga dalam perdagangan menjadi sebagian dari penyebabnya.

Selain itu, hal yang berkaitan dengan penurunan itu adalah pertama, komoditi cengkeh yang menjadi komoditi andalan ekspor sejak masa VOC tidak lagi diperdagangkan pada masa pemerintahan kolonial. Kedua, pemusnahan pohon cengkeh (*hongitochten*) dan digantikan komoditi baru kurang mendapat respon penduduk, disamping keahlian masyarakat masih rendah dalam hal tanaman baru tersebut. Ketiga, rakyat yang berprofesi sebagai pengumpul hasil hutan dan laut selalu disibukan untuk menyettor pajak kepada kraton. Keempat, para pedagang dari Bugis-Makassar dan Cina memilih berdagang di pelabuhan lain yang tidak dikenakan pajak. Kelima, munculnya daerah pesaing baru dari komoditi agraria seperti New

Guinea dan Manado. Keenam, merajalelanya bajak laut di perairan Maluku menjadi penghambat dari kegiatan ekspor dari Ternate (Hasyim, 2013). Berikut ini disajikan data ekspor dari Ternate periode 1882-1930.

Tabel 5: Ekspor Hasil Hutan Karesidenan Ternate 1882-1930 (dalam pikul)

Tahun	Pala	Kopra	Tembakau	Karet	Coklat	Damar
1882	<u>872</u>	<u>11.700</u>	1.540	5.600	-	8.414
1885	<u>780</u>	<u>16.598</u>	4.500	4.727	4.305	2.097
1886	<u>1.220</u>	<u>13.242</u>	5.000	-	2.700	-
1887	<u>2.950</u>	<u>16.500</u>	-	8.600	-	-
1890	<u>3.600</u>	-	-	13.00	-	8.000
1893	<u>4.100</u>	<u>17.000</u>	6.100	6.000	3.000	8.600
1894	<u>4.400</u>	<u>28.000</u>	7.500	-	-	9.070
1895	<u>6.000</u>	<u>18.500</u>	9.000	-	-	3.000
1897	<u>5.787</u>	<u>24.000</u>	7.200	-	-	6.000
1898	<u>7.560</u>	<u>17.500</u>	10.330	5.000	3.700	-
1899	<u>6.200</u>	<u>21500</u>	6.500	5.100	-	-
1900	<u>8.000</u>	<u>24.000</u>	-	7.000	-	-
1901	<u>7.600</u>	<u>24.350</u>	-	8.414	7.500	12.000
1904	<u>6.770</u>	<u>28.617</u>	3.670	10.988	5.195	11.679
1907	<u>6.360</u>	<u>30.421</u>	6.520	5.985	7.100	11.625
1910	<u>11.085</u>	<u>29.990</u>	-	-	8.700	6.232
1912	<u>9.770</u>	<u>31.100</u>	-	9.200	7.275	7.000
1916	<u>9.581</u>	<u>11.700</u>	-	8.171	6.600	8.414
1919	<u>9.360</u>	<u>18.617</u>	<u>5.700</u>	<u>7.880</u>	4.516	8.710
1921	<u>8.200</u>	<u>19.265</u>	<u>4.000</u>	6.696	<u>5.845</u>	<u>5.200</u>
1923	<u>10.120</u>	<u>11.366</u>	4.100	<u>5.600</u>	<u>3.500</u>	7.200
1925	<u>7.800</u>	<u>12.778</u>	3.850	<u>4.988</u>	<u>4.350</u>	<u>8.330</u>
1927	<u>9.100</u>	<u>18.516</u>	<u>7.000</u>	<u>4.880</u>	<u>2.500</u>	<u>8.000</u>
1928	<u>6.611</u>	<u>16.169</u>	3.980	4.171	3.100	<u>5.000</u>
1929	<u>4.860</u>	<u>15.932</u>	4.320	4.450	2.158	6.300
1930	<u>5.788</u>	<u>11.385</u>	3.300	5.320	2.075	5.750

Sumber: diolah dari *Kolonial Verslag* 1885-1930.

Memasuki dekade terakhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sektor ekspor mengalami pertumbuhan terutama pada tahun 1889-1913. Hal ini ditandai dengan dua hal. Pertama, kebijakan gubernur Maluku membuat perjanjian dengan KPM untuk melayari pelabuhan-pelabuhan kecil yang produktif untuk disingahi kapal KPM seperti pelabuhan Sanana, Bacan, Weda, Tobelo, Galela, Morotai dan Ibu secara bergilir. Kedua, pada tahun 1907 perusahaan-perusahaan besar seperti *Moluksche Handel Vonnootschap* (MHV), *Jacobson van Berg*, BAM, MKCM, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa dan pala telah berproduksi. Penguasa Ternate juga telah memberikan sebanyak 15 hak guna usaha atas nama pemerintah kepada perusahaan-perusahaan perkebunan di Ternate, Bacan, Sula, Morotai, Tobelo, dan Seram. Dengan kebijakan itu, maka ekspor Ternate dapat mencapai puncaknya f 166.000 pada tahun 1904 dan f. 850.000 pada tahun 1913. Kopra dan damar memberikan kontribusi utama pada pertumbuhan ekspor pesat ini dengan menghasilkan devisa masing-masing sebesar f 300.000 dan f 287.500. (*Kolonial Verslag*, 1915).

Pada tahun-tahun berikutnya, ekspor Ternate mengalami penurunan yang tajam disebabkan oleh terjadinya pemberontakan rakyat Jailolo (Halmahera) pada tahun 1914. Pemberontakan itu mengganggu konsentrasi pemerintah, yang lebih banyak pada bagaimana menumpas pemberontakan. Dalam periode 1914-1929 tahta kesultanan Ternate mengalami kekosongan karena sultan Ternate Usman Syah dituduh mendalangi pemberontakan tersebut dan akhirnya dibuang ke Bandung. Semua itu tentu berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat di Kepulauan Maluku, khususnya Ternate dan daerah sekitarnya (Adnan Amal, 2003).

Sejak meletusnya perang dunia I (1914-1918) mengakibatkan lalulintas pelayaran dunia menjadi terkendala, terutama pada pembatasan kuota beberapa komoditas ekspor dan impor tertentu. Hal ini berdampak pada nilai perdagangan di Ternate baik ekspor maupun impor. Situasi dunia yang tak menentu ini tidak hanya berpengaruh pada aktivitas para pedagang, tetapi juga perkembangan harga beberapa komoditi ekspor, terutama kopra yang cenderung tidak terkendali di pasaran lokal maupun internasional.

Pada tahun 1920 lalulintas pelayaran dunia berangsur pulih kembali. Dalam periode itu nilai ekspor Ternate berangsur-angsur naik, namun tidak terjadi seperti tahun 1899-1913. Pada tahun 1922 nilai ekspor Ternate berada pada angka f 68.000, lima tahun kemudian ekspor ini mencapai puncak f 69.000 pada tahun 1927. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejak perang dunia I antara nilai ekspor dan impor berada pada titik yang hampir seimbang. Akan tetapi nampaknya kondisi ini tidak dapat bertahan lama karena memasuki 1930 terjadi depresi ekonomi. Selama masa depresi itu hampir semua komoditi ekspor maupun impor mengalami penurunan yang cukup drastis. Di samping itu kebijakan pemerintah kolonial menaikkan pajak yang memberatkan rakyat.

Dari segi administrasi, Ternate mengalami perubahan peta wilayah pada masa depresi, yakni keluarnya Keputusan Gubernur Maluku No 2 tanggal 8 Februari 1930 di mana Karesidenan Ternate dibagi dalam tiga swapraja, yakni kesultanan Ternate, Tidore, dan Bacan. Berdasarkan *Besluit Gouverneur van de Grote Oost* no 2, maka wilayah New Guinea (Irian Barat) yang dahulu dimasukkan dalam wilayah Karesidenan Ternate dan Tidore melepaskan diri dan dimasukkan ke wilayah Karesidenan Ambon. Hal yang sama juga dialami pulau-pulau lain seperti Tambuku dan Banggai dipisahkan dari Ternate dan digabungkan ke dalam *Gouvernement der Celebes en Onderhorigheden* yang berpusat di Makassar (Hovenkamp, 1930). Dengan demikian kebijakan-kebijakan di atas mempengaruhi aktivitas relasi ekonomi masyarakat dan dampak ikutan lainnya yang sebagian harus berada di bawah kontrol Belanda yang berpusat di Makassar, seperti Banggai dan Tambuku. Pada periode ini juga Ternate tidak lagi mengalami pertumbuhan perdagangan sebagaimana yang dicapai sebelum depresi, tetapi terus mengalami penurunan sampai tahun 1942.

## ORANG CINA DALAM PERDAGANGAN DI TERNATE

Ternate muncul sebagai salah satu kota niaga di kawasan Timur Indonesia yang ramai. Posisinya sebagai salah satu pusat produsen komoditas perdagangan, banyak dikunjungi para pedagang dari berbagai bangsa, dengan tujuan melakukan aktivitas perdagangan melalui transaksi baik sesama pedagang maupun dengan masyarakat lokal. Perkembangan perdagangan yang pesat itu merupakan kelangsungan sejarah sejak abad-abad sebelumnya (16 dan 17) sejak cengkeh dan pala menjadi komoditas perdagangan primer. Situasi itulah yang mendorong tumbuhnya kota-kota pelabuhan seperti yang terjadi pada sejarah kota-kota pelabuhan Ternate, Tidore, Makian, Bacan, Sula, Ambon, Saparua, dan Banda. Bersamaan dengan itu muncul pula golongan pedagang perantara yang menjadi tulang punggung bagi kegiatan perdagangan. Kebijakan pelabuhan bebas pada tahun 1854 membawa dampak positif bagi aktivitas usaha perdagangan di Karesidenan Ternate. Situasi itu juga didukung oleh pencabutan kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda atas pelarangan perdagangan Cina. Sejak itu para pedagang Cina mendiami mulai berdatangan dan ikut bermukim di ibukota, Ternate. Para pedagang Cina itu mengembangkan aktivitas ekonominya sampai ke Papua. Beberapa tempat yang memiliki tempat yang strategis dalam aktivitas perdagangan pedagang-pedagang Cina di Kepulauan Maluku adalah Ternate, Labuha, Tobelo, Kau, Jailolo, Sidangoli, Dodinga, Bobane Igo, Galela, Weda, Patani, Bicoli, Ngofakiaha, Sanana, Sailolof, Misool, dan Sekar. Mereka juga mencapai ke beberapa desa di Keresidenan Ternate.

Dilihat dari aspek ikatan fungsional dan geografis pedagang di karesidenan Ternate terbagi menjadi dua yaitu; pertama, golongan pedagang yang beroperasi di sekitar pelabuhan atau pantai. Kedua, golongan pedagang yang beroperasi di pedalaman. Golongan pertama ini umumnya ditempati oleh para pengusaha Belanda (eksportir). Sementara golongan kedua banyak terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan daerah pedalaman.

Umumnya mereka adalah pedagang perantara atau biasanya dikenal pedagang keliling (Cina, Bugis-Makassar, Jawa, Melayu) yang bermukim dibandar perdagangan yang letaknya disekitar Fort Oranje dan kedaton Ternate. Para pedagang perantara ini bukan hanya berdagang di pulau Ternate, tetapi juga tersebar di beberapa bandar-bandar seperti Tidore, Bacan, Makian, Sula, Ambon, Saparua, Haruku, Nusa Laut, Banda, Kei, dan New Guinea (Paramita R. Abdurachman, 1978). Mereka merupakan golongan wiraswasta yang hidup dari usaha perdagangan yang erat hubungannya dengan sektor kemaritiman, seperti navigasi perahu, pelayaran, dan perdagangan. Pedagang keliling inilah yang merupakan golongan wiraswasta, karena mereka yang menjalankan usaha perdagangan dengan cara menjajakan barang-barang dagangnya secara langsung ketempat yang jauh ataudalam artikel ini sebagai perdagangan antar pulau (Singgih Tri Sulistiyo, 2003)

Tidak terdapat catatan yang memadai mengenai jumlah dari masing-masing kelompok pedagang ini. Namun, dari berbagai keterangan yang muncul dapat diketahui bahwa memegang peranan penting terutama pedagang burger (Belanda), Makassar, dan Cina. Para pedagang itu tergolong pemilik modal yang selalu berlayar menuju pelabuhan-pelabuhan yang dianggap memiliki komoditas, khususnya di luar dan dalam Kepulauan Maluku. Pelayaran mereka adalah sekaligus berdagang secara sirkuler seperti Makassar, Surabaya, Batavia dan sebagainya. Untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan penduduk pribumi, misalnya tekstil, besi, dan makanan yang kemudian dijual kepada penduduk. Dilaporkan pada tahun 1861 bahwa ada pedagang, pemilik modal dari burger (Belanda) seperti Van der Plas yang menjabat sebagai *kapitein der burgerij* di Ternate yang memiliki perahu jenis konting (sekoci) dengan pemimpin nahkoda yang bernama Johan Hermansen yang dipakai untuk berdagang sampai ke kepulauan Raja Ampat (Papua). Burger lainnya yang memiliki sebuah konting adalah Elias van Room, dan George Durr memiliki sebuah padewakang yang digunakan untuk berdagang sampai ke Manado (Mansoben, Johsz R, 1985).

Demikian pula beberapa burger Daniels, Christian Gomes, dan Laisow yang memiliki perahu dagang jenis pancalang. Kelompok ini merupakan kelompok yang muncul paling belakangan. Perwakilan utama dari kelompok dagang Eropa adalah perusahaan pelayaran *Koninklijk Paketvaart Maatschappij* (KPM) dan *Batjan Maatschappij* yang kemudian berubah menjadi *Batjan Archipel Maatschappij* (BAM). Sifat usaha mereka yang paling mencolok dalam aktivitas perikanan adalah pengadaan usaha transportasi pelayaran karena dukungan teknologi perkapalan, dalam hal kecepatan, dan daya angkut (kapasitas muat) yang mereka miliki. Selain itu kelebihan utama dari kapal uap adalah kemampuan mereka untuk berlayar di sepanjang musim.

Sejak beroperasinya perusahaan pelayaran *Koninklijk Paketvaart Maatschappij* (KPM) dan *Batjan Maatschappij* pada tahun 1882. Maka perusahaan berupaya memanfaatkan eksploitasi mutiara yang berada di sekitar Kepulauan Bacan. Mereka umumnya berusaha membeli mutiara hasil tangkapan penduduk Galela-Tobelo yang bermigrasi di sekitar

Kepulauan Bacan. Akan tetapi, rupanya hal ini tidak dapat bertahan lama karena ketiadaan tenaga kerja dan ketidakmampuan perusahaan mengikat nelayan pencari mutiara untuk selalu menjual hasil produksi mereka ke perusahaan sehingga pembelian mutiara cenderung bersifat sementara dan sporadis. Kondisi ini mendukung peningkatan aktivitas perdagangan di sekitar Kepulauan Bacan dengan meluasnya aktivitas penangkapan dan pengolahan ikan asin dan asap oleh nelayan Bacan pada tahun-tahun di penghujung dekade 1890-an. Bahkan, perluasan jalur-jalur pelayaran ke Kepulauan Sula dan pantai timur pulau Halmahera berjalan seiring dengan peningkatan aktivitas perdagangan khususnya pembelian produksi laut seperti tripang, kerang, dan mutiara. (Leirissa, 1999).

Sementara itu orang-orang Bugis-Makassar tidak hanya datang berdagang, tetapi juga banyak menetap di Karesidenan Ternate dalam membentuk diaspora perdagangan pribumi yang aktif. Sebagai pedagang di kepulauan Maluku Utara, para pedagang tersebut merupakan pedagang perantara yang telah maju untuk ukuran zaman itu. Pedagang Bugis-Makassar merupakan pedagang yang telah lama melakukan usaha dagangnya di wilayah ini. Peran aktif mereka dalam usaha perdagangan telah diketahui sejak abad ke-16, atau semenjak intensifnya perluasan dan perkembangan perdagangan dan kekuasaan politik Kerajaan Gowa-Tallo atau Makassar. Meskipun orientasi utama usaha mereka adalah perdagangan rempah-rempah, namun produk tripang sejak abad ke-16 juga merupakan komoditi penting yang berasal dari sekitar Kepulauan Maluku.

Para pedagang perantara itu menyertai perahu-perahu dagang mereka menuju pelabuhan yang letaknya di luar Ternate, seperti Halmahera, Tidore, Bacan, Makian, Sula, Ambon, Saparua, Haruku, Nusa Laut, Banda, Kei, dan New Guinea. Dengan melalui sistem barter (kadang-kadang secara kredit) mereka menyalur berbagai barang kebutuhan yang tidak dihasilkan ditempat-tempat terpencil, seperti bahan-bahan pangan dari besi maupun bahan-bahan dari pakaian (tekstil) yang diimpor. Bahan-bahan itu dibarter dengan berbagai produk laut, seperti tripang, penyu, dan mutiara. Beberapa contoh pedagang yang berasal dari Makassar yang sering muncul pada kurun waktu (1862-1870) adalah Soey, Jalaludin, Abdul Kasim, Maksudin, dan Baba. Para pedagang itu memiliki fasilitas tersendiri, seperti perahu yang digunakan untuk berdagang ke daerah lain. Kelompok pedagang Bugis-Makassar juga membentuk jaringan perdagangan dengan menempatkan salah seorang dari mereka di desa-desa tempat komoditi hasil laut berasal. Pada abad ke-18 dan 19, pola ini kian meningkat dengan pusat kegiatan di Makassar. Akan tetapi setelah pendirian negara Hindia Belanda yang perlahan-lahan memusatkan kekuasaan ekonomi dan politik ikut mengurangi peran penting mereka dalam aktivitas ekonomi (L. Rajiloen, 1980).

Pada abad ke-19, pedagang Bugis-Makassar diperkirakan berjumlah 97 orang atau 7,4% dari populasi orang asing. Para pedagang Makassar ini tidak terbatas pada perdagangan ekspor saja, mereka juga menguasai sebahagian perdagangan impor, seperti beras, mesiu, tekstil, dan bahan makanan. Beberapa hasil laut berupa tripang, penyu, dan mutiara juga merupakan merupakan komoditi penting yang berasal dari Karesidenan Ternate, tentu saja

selain rempah-rempah, sangat diminati oleh pedagang Bugis-Makassar. Dalam proses penjualan barang-barang kebutuhan lokal di karesidenan Ternate, pedagang Makassar memanfaatkan rangkaian toko-toko atau menjualnya lewat jaringan lain yang dilakukan melalui struktur kongsi di antara para pedagang Makassar itu sendiri. Toko-toko menjadi dasar komersial bagi pedagang Makassar di pedalaman dan menyebarkan komoditi impor di desa-desa yang sulit dijangkau untuk mendapatkan komoditas ekspor. Mereka seringkali menukarkan prooduk laut berupa ikan atau kulit penyu dengan kain atau peralatan besi dari sekitar Kepulauan Banggai dan Buton. Akan tetapi keterbatasan modal dan akses, maka ikut menghambat perluasan jaringan dagang mereka. (Clercq, F.S.A, 1870).

Selain pedagang asing (burger, Bugis-Makassar dan Arab) adalah Cina. Para pedagang Cina merupakan pedagang yang penting perannya. Kedatangan orang-orang Cina sejak awal didorong oleh adanya perubahan dan perkembangan yang terjadi pada periode sebelumnya, yakni ramainya pelayaran dan perdagangan yang terjadi di sepanjang jalur sutra hingga ke Eropa. Tujuannya adalah untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru yang laku khususnya di pasar Eropa seperti cengkeh dan pala di Maluku. Dalam kaitan itu, sebagaimana dikemukakan oleh Skinner bahwa kehadiran orang-orang Cina tidak semata-mata disebabkan oleh adanya faktor internal di daerah asalnya berupa perang dan konflik, kelaparan dan tantangan alam yang tidak memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, tetapi lebih karena adanya peluang ekonomi baru. Pada konteks yang sama perkembangan kota Ternate sebagai kota niaga yang ramai ikut menjadi faktor yang mendorong orang-orang Cina menetap dan berdagang secara aktif di Ternate.

Kehadiran orang-orang Cina di Ternate jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Kedatangan mereka untuk membeli cengkeh untuk diperdagangkan dengan harga lebih mahal. Dengan semangat dagang yang besar, orang-orang Cina tidak hanya tinggal di kota-kota pelabuhan tetapi juga di pedesaan. Atas persetujuan sultan, mereka melakukan perdagangan hingga ke pedalaman, terutama Halmahera dan Papua. Orang-orang Cina menetap di kampung Cina. Mereka juga memiliki kapal untuk mengirim barang dalam jumlah lebih banyak ke pelabuhan-pelabuhan besar seperti, Makassar, Surabaya, Batavia, dan Singapura. Beberapa orang Cina yang muncul dalam periode tersebut, misalnya; *kapitein der Chineezsen* yang dijabat oleh Phoanlok, Si Siong dan Tjiheen yang memiliki perahu dagang yang digunakan untuk berdagang sampai di Papua. Sebagian dari mereka menjadi pedagang besar yang menguasai perdagangan komoditas di Ternate (Lapian, 1980).

Jika pada masa sebelumnya, orang-orang Cina belum menunjukkan eksistensinya sebagai pedagang perantara, maka pada pemerintahan Hindia Belanda, fungsi ini dipegang para pedagang Cina (selain Bugis- Makassar). Pada umumnya para pedagang kalangan industri yang sebagian besar dikuasai eksporti Eropa sangat memerlukan jasa pedagang perantara. Biasanya pedagang skala besar mengurus perdagangan ekspor impor, sedangkan pedagang skala kecil maupun pedagang perantara yang membeli barang-barang dari tangan kedua atau ketiga untuk kemudian dijual kepada konsumen. Oleh karena itu peranan

pedagang perantara sangat penting dalam menghubungkan antara pembeli dan penjual.

Sebagai golongan yang bergerak dalam bidang perdagangan, maka usaha yang dilakukan oleh para pedagang Cina pada masa itu sudah dilandasi oleh motivasi mencari keuntungan. Sebagaimana kemukakan A.C. van der Leeden bahwa pada prinsipnya pedagang-pedagang Cina memiliki jiwa dagang tinggi bila dibandingkan dengan pedagang-pedagang pribumi. Mereka menyebar di hampir semua wilayah karesidenan Ternate. Pedagang perantara yang banyak dilakukan oleh orang-orang Cina merupakan mata rantai antara perdagangan besar (ekspor-impor) yang ada di pasar dan sekitar pelabuhan. Mereka juga sebagai pedagang enceran di setiap distrik, yang berarti bahwa para pedagang Cina menguasai hampir semua struktur ekonomi (Van Fraassen, 1980).

Pada dekade terakhir abad ke-19 peranan pedagang Cina sebagai pedagang perantara dalam melakukan perdagangan mengalami peningkatan. Seiring dengan semakin meningkatnya investasi perkebunan oleh pengusaha swasta, seperti *Motuksche Handel Vennootschap* (MHV) dan *Bacan Maatschapij* (1882). Bersamaan dengan beroprasinya perusahaan-perusahaan besar, pedagang-pedagang Cina mulai membuka toko-toko di kota hingga ke desa-desa. Karena bertindak juga sebagai tengkulak, semua komoditi ekspor seperti kopra, damar, mutiara, tripang, sirip ikan hiu dan berbagai hasil hutan jatuh ke tangan pedagang Cina. Peran penting pedagang Cina, dalam hal ini tampak dalam aktivitas perdagangan tripang dan penyu di Karesidenan Ternate. De Clercq mengatakan bawah secara umum pembelian hasil laut seperti tripang, penyu, dan mutiara oleh pedagang Cina, selalu melalui sistem pertukaran atau sistem barter. Komoditas yang diperdagangkan adalah kain, beras, perhiasan, dan peralatan besi. Komoditas yang berasal dari hasil laut berharga tinggi dan menjadi salah satu barang mewah yang ramai dipertukarkan. Barang-barang dari Cina seperti mangkuk keramik Cina (*mangko naga*) juga menjadi barang berharga sebagaimana terjadi di pesisir utara dan timur Halmahera. Kehadiran para pedagang Cina di Kau memiliki keterkaitan dengan faktor ekonomi, khususnya pemberian kredit. Di tempat ini beberapa pedagang Cina bermukim. Mereka menjalin interaksi dan ikatan sosial yang baik dengan penduduk Alfur. Hal ini ditunjukkan oleh aktivitas pedagang Cina hingga pedesaan. Mereka terlibat dalam penguasaan perdagangan kelapa dan damar yang melibatkan penduduk lokal. Bahkan Baretta melaporkan bahwa orang Alfur membayar hutang sebagian atau seluruhnya dengan ikan, kopra, kerang, atau tenaga kerja kepada orang-orang Cina (Clercq, F.S.A, 1870).

Banyak penduduk di Afdeling Kao, Tobelo, dan Galela berhutang pada para pedagang Cina dalam bentuk barang konsumsi seperti kain dan juga uang untuk pelunasan pajak. Para pedagang Cina selalu memberikan pinjaman kepada penduduk. Sementara penduduk Alfur yang berpikiran sederhana dan jujur tentunya mengingat bantuan dari para pedagang Cina. Bantuan itu menjadi bagian dari ikatan sosial. Sistem pelunasan hutang biasanya dilakukan melalui pembelian hasil laut seperti mutiara, tripang, dan penyu dari penduduk Alfur yang berhutang. Seringkali pembayaran hutang dipotong dari pembelian mutiara. Seperti yang dikemukakan Onghokham bahwa pedagang Cina sering bertindak

sebagai pelepas uang tunai terlebih dahulu kepada para petani baik secara kredit maupun secara tunai. Sistem inilah yang menjerat para petani untuk tidak menjual hasil buminya kepada pedagang lain (Onghokham, 1996).

Koentjaraningrat mengatakan bahwa sistem niaga kopra dari hasil produksi rakyat di lakukan oleh pedagang-pedagang Cina terhadap petani kelapa, selalu memberikan uang muka terlebih dahulu sebagai uang persekot untuk mengikat para petani kelapa dalam hal harga maupun penjualan hasil komoditinya. (Koentjaraningrat, 1989). Hal yang sama juga diterapkan oleh pedagang Cina terutama di Afdeeling Tobelo, Sula, dan Morotai adalah tempat perkebunan kelapa masyarakat sejak tahun 1907 sehingga mengakibatkan petani tidak berdaya dalam menentukan harga kopra.

Dengan adanya pola perdagangan seperti inilah mengantarkan pedagang Cina tumbuh menjadi pedagang perantara (*middlemen*) yang semakin penting dalam perdagangan di Karesidenan Ternate. Para pedagang Cina peranakan yang juga sebagai pedagang perantara di Ternate selalu melakukan penyatuan dengan masyarakat lokal. Hal ini dibuktikan dengan adanya para pedagang Cina yang melakukan pemikahan dengan wanita-wanita pribumi. Dengan cara ini jaringan niaga Cina dan pribumi tetap terpelihara. Jalinan ini terus berlangsung hingga tahun-tahun berikutnya.

## KESIMPULAN

Realitas menunjukan faktor utama yang mendorong kedatangan para pedagang dari Cina, India, dan Arab sebelum abad ke-14 adalah karena kebutuhan pada komoditas rempah-rempah. Hal yang sama juga terjadi pada bangsa-bangsa Barat, yakni datang ke kepulauan Maluku pada permulaan abad ke-16 Ternate. Keberadaan bangsa-bangsa Barat terutama Belanda berhasil menguasai aspek ekonomi dan politik. Kemudian direpresentasikan secara dominan melalui praktik kolonialisme dan kapitalisme. Ketika kekuasaan VOC di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Belanda, maka itu menandai secara formal pemerintah Belanda berkuasa secara politik. Hal yang sama juga ketika Ternate dijadikan sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1854, tidak terlepas dari kepentingan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi. Bahkan telah menjadi bagian yang integral dalam aktivitas di koloninya.

Aktivitas perdagangan di Karesidenan Ternate periode 1854-1930, dapat dibagi ke dalam tiga tahapan penting, *pertama*, periode 1854-1881, adalah suatu periode awal ketika pelabuhan Ternate dijadikan sebagai pelabuhan bebas. Periode ini ditandai dengan dihapusnya monopoli cengkeh 1864. *Kedua*, periode 1882-1913 yang merupakan tahap perkembangan atau pertumbuhan perdagangan. Periode ini ditandai oleh adanya investasi swasta di bidang perkebunan dan hadirnya KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*) terlibat aktif dalam pengangkutan barang dan orang. *Ketiga*,

periode 1914-1930 yang merupakan tahap akhir dari perkembangan atau periode kemerosotan di mana terjadi perang dunia I dan resesi ekonomi.

Kehadiran pedagang nusantara, Eropa, Arab, dan Cina telah mendukung eksistensi Ternate dan masyarakatnya aktif dalam aktivitas perdagangan. Komoditas baru dari laut dan pembukaan perkebunan yang melibatkan swasta dan dukungan penguasa Ternate telah menjadi pelanjut dari era keemasan produk rempah. Oleh karena itu, salah satu kontribusi dari artikel ini adalah pelajaran penting dari sejarah ekonomi Ternate bahwa kesinambungan dari aktivitas ekonomi harus melalui stimulus penguasa, meskipun muara dari stimulus itu, tetap saja rakyat Ternate dan komoditasnya menjadi korban dari praktik ekonomi yang sedang berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Jusuf et al., *Temate Bandar Jalur Sutra*, Jakarta:LITS, 2001 .
- Amal, Adnan. *Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1250- 1800* Jilid 1, (Universitas Khairun Ternate, 2003)
- Andaya, Leonard Y. *The World of Maluku Eastern Indonesia in the Early Modern Period*, Honolulu: University of Hawaii Press, 1993.
- Beretta, A.M. *Halmahera and Morotai*, Batavia: Javasche Boekhandel, 1917.
- Burger, D.H. *Sedjarah Ekonomis-Sosiologia Indonesia*, jilid 1 terjemahan Prayudi Atmosudirdio, Jakarta: Pradnjaparamita, 1987.
- Befshaw, Cyril S. *Tukar Menukar Tradisional dan Pasar Modern*, terjemahkan Soebyanto, Jakarta; Gramedia, 1981.
- Clercq, F.S.A. *Bijdingen tot de Kennmis der Residentie Temate*. Leiden: Brill. 1820
- Crab, *De Moluksche Eiland, Rerse van Z.E. den Gouvemeurt Genenal Ch.f. Fahud Door den Molukschen Arcipel*. Batavia: Lange, 1862.
- Grap, P van der. " Geschiedenis van Ternate, in Teranataansche en Maleische Tekst, Beschreven Dor den Ternatean Naidah, Met Vertaling en Aante keningen Door P. A. van der Cerap ". dalam *BKL*, jilid 26. No 2.1978.
- Dick, H.W. *Industri Pelayaran Indonesia: Kompetisi dan regulasi*. Terjemahan oleh Burhanuddin Abdullah & Maman Hendarman, Jakarta: LP3ES,1987.
- Dick, Howard W. "Prahu Shipping in Eastern Indonesia. Part I." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 11, no. 2 (1975).
- E.K. M. Masinambaw "Halmahera dan Raja Ampat Konsep dan Strategi Penelitian, Jakarta: LEKNAS-LIPI, 1980.

- Fraassen, F van. "Ternate de Molukken en de Indonesische Archipel. Van soa organisatie en Viedeling: Een Studie van Traditionele Samenleving en Cuoltuur in Indonesie". Disertasi Leiden. 1987
- Hanna Willard A. *Kepulauan Banda Kolonialisme dan Akibatnya di Kepulauan Pala*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Hasmawati dan Rustam Hasyim, "Kedudukan Elite Kesultanan Ternate Dalam Masyarakat Ternate". Dalam *Jurnal Ilmu Budaya Unhas*, Vol. 5. No. Juli, 2017.
- Hasim, Rustam. *Dari Cengkeh Ke Kerang Mutiara: Perdagangan Di Karesidenan Ternate, 1854-1930*, Ternate: Lepkhair, 2013.
- \_\_\_\_\_, "Dari Mitos Tujuh Putri Hingga Legitimasi Agama: Sumber Kekuasaan Sultan Ternate", Dalam *Jurnal Sasdaya, Gadjah Mada Journal of Humanities*, Vol.1. No. 2017.
- Hoeverell, W.R. van. *Sejarah Kepulauan Maluku: Kisah Kedatangan Orang Eropa Hingga Monopoli Perdagangan Rempah*. (Yogyakarta: Ombak, 2014).
- Kotopopo, L. *Nuku Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Koentjaraningrat, *Masyarakat dan Kopra Rakyat di Pantai Utara Irian Barat*, Jakarta, Bhatara, 1989.
- Kontowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Wijaya, 2001.
- Lapian, A.B. dalam pengantar *Memoire van Overgouw J.H. Tobias (1857)-Memorie van Overgave C. Bosscher Residen Temate (1859)*, (Jakarta: ANRI, 1980).
- Leirissa, R.Z. et. al., *Temate Sebagai Bandar Jalur Sutra*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Nasional, Depdikbud, RI, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Halmahera Timur dan Raja Jailolo Pergolakan Sekitar Laut Seram Awal Abad 19*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Maluku Tengah di Masa Lampau Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas*, (Jakarta: ANRI, 1982)
- Lindblad, Thomas "Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa, 1910-1940" dalam J. Thomas Lindblad, et. al., (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998).
- \_\_\_\_\_, et.al., (Ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM, 2002.
- Parimartha, I Gde *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1816-1915*, Jakarta: Penebit Djambatan .2002.

- 
- Poelinggomang, Edward L. "Proteksi dan Perdagangan Bebas: Kajian Tentang Perdagangan Makassar Pada Abad ke-19", Amsterdam: Academisch Proefschrift de Vrije Universiteit te Amsterdam, 1991.
- Rabani, La Ode. "Commercial activities and development of the towns in the west side of Banda Sea Indonesia, early twentieth century." *Urban Studies: Border and Mobility*, 2019.
- Reid, Anthony. *Dari Ekspansi hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Sulistiyono, Singgih T. "The Java Sea Network: Patterns in The Development of Interregional Shipping and Trade in the Process of National Economic Integration in Indonesia, 1870s-1970s", *Disertasi di Universitas Leiden*, 2003
- Suryo, Djoko et. al., *Agama dan Perubahan Sosial Studi Tentang Hubungan Antar Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik*, Yogyakarta UGM LKPSM, 2001.
- Kolonial Verslag 1855-1930*